

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Dalam era digital dan konsep *open government*, masyarakat semakin menuntut keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik. Sistem pengelolaan informasi yang cepat, efektif, dan mudah diakses oleh publik diperlukan karena transformasi digital yang meluas di berbagai sektor. Untuk menangani masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan semua lembaga pemerintah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka, tepat waktu, dan dengan biaya yang rendah (Ndau Lendong dkk., 2021).¹

Secara strategis, keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk membantu pengawasan demokratis dan memungkinkan masyarakat untuk menilai bagaimana penyelenggara negara bertindak. Menurut publikasi indeks keterbukaan informasi publik (IKIP), nilai IKIP nasional pada tahun 2021 mencapai 71,37, dan diklasifikasikan sebagai kategori “sedang” oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Meskipun angka-angka ini meningkat, sebagian besar lembaga publik masih belum mencapai tingkat keterbukaan yang ideal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara peraturan yang berlaku dan praktik di lapangan.

Keterbukaan informasi publik masih menghadapi banyak tantangan, menurut beberapa penelitian. Termasuk masalah teknis yang berkaitan dengan pengarsipan data, hambatan administratif yang dapat memperlambat layanan informasi, dan pengaruh politisi dan birokrat yang dapat menghambat akses publik terhadap informasi (Ferdaus & Zaimasuri, 2023).²

¹ Romnanus Ndau Lendong dkk., “Jurnal Keterbukaan Informasi Publik,” 7.2 (2021), hal 3 –5.

² Feri Ferdaus dan Zaimasuri Zaimasuri, “Implementation of Public Information Disclosure Policy In The House of Representatives of the Republic of Indonesia,” *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3.1 (2023), hal. 30, doi:10.35912/jgas.v3i1.1771. 1

Dalam hal ini, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah alat penting untuk menilai dan meningkatkan penerapan kebijakan keterbukaan di berbagai organisasi (Guslina Sufa dkk., 2022).³

Digitalisasi dan *e-government* telah mengubah pendidikan. kementerian komunikasi dan informatika dan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi mendorong institusi pendidikan untuk menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data publik dan layanan. Diharapkan bahwa sistem online ini dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak institusi pendidikan masih menghadapi masalah seperti sumber daya manusia yang terbatas, infrastruktur teknologi yang kurang, dan kurangnya komitmen manajemen (Wahyuni dkk., 2024).⁴

Lembaga pendidikan terutama Sekolah Menengah Pertama (SMP), diwajibkan secara hukum dan moral untuk memberikan informasi kepada publik. Semua orang, terutama orang tua, dan siswa, harus dapat mengakses informasi tentang kebijakan sekolah, program pendidikan, anggaran, dan prestasi siswa. Namun, meskipun sekolah adalah pusat pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat, penelitian tentang keterbukaan informasi publik di sekolah dasar dan menengah sangat terbatas.

Sesuai dengan statusnya sebagai institusi pendidikan negeri di ibu kota, SMP Negeri 115 Jakarta memiliki kewajiban yang signifikan untuk mematuhi prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008. Website resmi sekolah, yang dapat diakses di <https://www.smpn115-jkt.sch.id/>, berfungsi sebagai media utama untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Situsweb sekolah bertujuan untuk mempromosikan tata kelola informasi yang jelas, inklusif, dan akuntabel. Struktur situs yang sederhana memudahkan akses ke menu

³ Ira Guslina Sufa, Tri Mardiana, dan Abdul Mardiana, *Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)*, 2022.

⁴ Hermin Indah Wahyuni dkk., "Technology, transparency, and collaboration/integration: Analysis of digital government problems from public communication perspective during the COVID-19 pandemic in Indonesia," *Information Polity*, 29.1 (2024), hal. 94–105, doi:10.3233/IP-211545.

utama, termasuk pengumuman, tenaga pendidik, kegiatan sekolah, dan ruang belajar. Situs ini juga diperbarui secara berkala untuk menampilkan aktivitas dan prestasi siswa, termasuk keberhasilan di Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Olimpiade Sains Junior (IJSO) pada tahun 2025 (SMPN 115 Jakarta, 2025).

Pemilihan SMP Negeri 115 Jakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hasil observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah website sekolah menengah pertama negeri di wilayah Jakarta. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa website 115 Jakarta memiliki karakteristik yang relatif lebih aktif dibandingkan beberapa website sekolah lainnya. Sekolah secara konsisten memperbarui informasi mengenai kegiatan, prestasi, pengumuman, layanan PPID, serta berbagai program sekolah. Selain itu, tersedia pula fitur survei layanan dan permohonan informasi yang menunjukkan upaya sekolah dalam mengembangkan pelayanan informasi publik berbasis digital. Sebaliknya, pada beberapa website sekolah lain masih ditemukan keterbatasan berupa minimnya pembaruan konten, informasi yang tidak berkelanjutan, atau hanya menampilkan profil sekolah tanpa pengembangan layanan informasi yang memadai. Perbedaan karakteristik tersebut menjadikan SMP Negeri 115 Jakarta sebagai kasus yang relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Pembaruan terbaru dapat dilihat pada unggahan tanggal 22 Januari 2026 yang berisi informasi tentang prestasi SMP Negeri 115 Jakarta, yang dianugerahi penghargaan oleh Walikota Administrasi Jakarta Selatan atas kontribusinya pada pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2025. Konsisten dalam menyediakan informasi seperti ini menunjukkan bahwa sekolah benar-benar berkomitmen untuk tetap jujur dan tanggung jawab kepada masyarakat. Secara umum, website SMP yang dievaluasi dengan baik di Jakarta memiliki desain yang modern, responsif, dan informatif. Mereka juga mudah diakses untuk memenuhi persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan memberi informasi akademik. Dalam hal ini, si Website SMP Negeri 115 Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga membantu meningkatkan reputasi

sekolah melalui publikasi kegiatan dan kolaborasi strategis. Misalnya, bekerja sama dengan Transjakarta untuk membangun halte Smabel Stop dan bekerja sama dengan Palo Alto Network untuk mengadakan seminar nasional tentang literasi siber pada tahun 2025. Ini adalah contoh komitmen sekolah untuk meningkatkan literasi digital dan memperluas jejaring kerjasama melalui inisiatif ini.

Pengelolaan dan keberadaan konten ini menunjukkan komitmen SMP Negeri 115 Jakarta untuk meningkatkan literasi digital dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal. Sekolah menggunakan website secara konsisten untuk menunjukkan perannya sebagai lembaga pendidikan yang fleksibel terhadap kemajuan teknologi dan aktif bekerja sama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Mereka juga menyampaikan informasi tentang kegiatan.

Prestasi lain yang semakin memperkuat komitmen sekolah terhadap keterbukaan informasi publik terlihat melalui keberhasilan SMP Negeri 115 Jakarta meraih predikat “Badan Publik Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI DKI Jakarta Award) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada 22 Desember 2025. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa sekolah mampu menerapkan prinsip transparansi informasi secara optimal melalui layanan informasi berbasis digital. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya sebatas pemenuhan indikator administratif, melainkan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan SMP Negeri 115 Jakarta memperoleh predikat tersebut didukung oleh penerapan sistem E-Monev dalam pengelolaan informasi sekolah secara real-time, mulai dari akses data kurikulum, prestasi peserta didik, hingga laporan kegiatan ekstrakurikuler. Capaian ini sekaligus memperlihatkan bahwa transparansi informasi telah menjadi bagian dari budaya organisasi sekolah dalam membangun pendidikan yang berkualitas, terbuka, dan akuntabel.

SMP Negeri 115 Jakarta masih menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, meskipun memiliki sarana

digital yang berfungsi. Di antaranya adalah tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, keterbatasan kapasitas server, peningkatan permintaan informasi digital setelah kurikulum merdeka, dan kekurangan tenaga kerja teknis. Karena situs web masih bergantung pada satu orang, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pembaruan konten tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatkan kapasitas digital, memberikan pelatihan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membangun sistem informasi yang berkelanjutan adalah semua hal yang sangat penting.

Informasi pada lama resmi sekolah yang membuat keberhasilan SMPN 115 dalam melewati Verifikasi SAQ serta memamparkan pengembangan PPID pada e-monev 2025 menunjukkan bahwa upaya keterbukaan informasi publik di sekolah ini berjalan dengan terarah dan terus dievaluasi. Temuan tersebut semakin menegaskan bahwa SMPN 115 merupakan objek yang tepat untuk dikaji dalam konteks transparansi informasi berbasis digital.

Fakta keterbatasan tersebut sejalan dengan hasil studi sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan oleh (Syeh dkk., 2022),⁵ hanya sekitar 22,35% situs web pemerintah daerah di Sulawesi Selatan memiliki informasi publik yang lengkap sesuai dengan standar layanan publik. Ini menunjukkan bahwa banyak lembaga pemerintah, termasuk institusi pendidikan, masih tidak terbuka tentang informasi digital. Selain itu, penelitian oleh (Chairunnisa dkk., 2023)⁶ menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan pelaksanaan kebijakan internal sangat memengaruhi keberhasilan penerapan keterbukaan informasi.

Dengan mempertimbangkan keadaan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana SMP Negeri 115 Jakarta menggunakan website

⁵ Fathur Firman Syeh, Andi Subhan Amir, dan Nosakros Arya, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan," *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 6.2 (2022), hal. 209-218, doi:10.24853/pk.6.2.209-218.

⁶ La Lathifah Chairunnisa dkk., "Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang," *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 11.2 (2023).

resmi sekolah untuk menerapkan sistem keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana lembaga pendidikan menengah negeri mampu menerapkan prinsip transparansi publik di era digital. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang *egovernance* dan transparansi digital di sektor pendidikan. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi acuan bagi sekolah dan pemangku kebijakan untuk memperkuat sistem informasi publik yang efektif, profesional, dan berkompeten.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Menganalisis penerapan sistem keterbukaan informasi publik berbasis digital di SMP Negeri 115 Jakarta melalui website sekolah. Adapun dengan subfokus penelitian ini adalah:

1. Mengkaji kebijakan internal sekolah terkait keterbukaan informasi publik dan kesesuaiannya dengan peraturan nasional.
2. Menilai ketersediaan serta kualitas sarana digital seperti website, jaringan internet, dan sistem informasi sekolah.
3. Menganalisis pengelolaan informasi publik yang meliputi jenis data, pembaruan konten, dan dokumentasi digital.
4. Meneliti kemudahan akses masyarakat terhadap informasi sekolah melalui kanal digital dan respons sekolah terhadap permintaan informasi.
5. Mengulas kebijakan serta praktik perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi sekolah.
6. Mengidentifikasi kompetensi dan peran pengelola informasi digital, termasuk PPID sekolah.

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan internal sekolah mendukung keterbukaan informasi publik dan sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi nasional?

2. Bagaimana kondisi infrastruktur dan teknologi digital sekolah dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui website?
3. Bagaimana informasi publik dikelola secara digital di SMP Negeri 115 Jakarta mencakup pengaturan jenis data, pembaruan konten, dan proses pendokumentasiannya?
4. Bagaimana layanan dan akses informasi publik difasilitasi melalui kanal digital sekolah?
5. Bagaimana kebijakan dan praktik perlindungan data diterapkan untuk menjaga keamanan informasi publik di sekolah?
6. Bagaimana kompetensi dan peran SDM sekolah, termasuk PPID, dalam pengelolaan keterbukaan informasi digital?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis kebijakan dan regulasi sekolah dalam penerapan keterbukaan informasi publik.
2. Mendeskripsikan infrastruktur dan teknologi digital yang digunakan sekolah untuk mengelola informasi publik.
3. Mengkaji sistem manajemen informasi dan mekanisme pelayanan publik berbasis digital.
4. Menilai upaya perlindungan data dan keamanan informasi sekolah.
5. Mengidentifikasi kompetensi dan peran SDM dalam mendukung keterbukaan informasi digital.
6. Mengevaluasi efektivitas sistem keterbukaan informasi publik melalui mekanisme monitoring dan evaluasi digital.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian manajemen Pendidikan, khususnya dalam bidang keterbukaan informasi publik dan tata Kelola sekolah di era digital.

- b. Hasilnya dapat menambah pemahaman tentang penerapan prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab) di lingkungan sekolah menengah.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik menelaah penerapan keterbukaan informasi berbasis teknologi di sektor pendidikan.
- d. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual dalam pengembangan model tata kelola sekolah yang transparan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk memperkuat praktik keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan website yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya literasi digital serta peran aktif dalam mendukung layanan informasi yang transparan
- c. Penelitian ini memberikan masukan dalam penyusunan strategi penguatan PPID sekolah sebagai wujud pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- d. Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan hak memperoleh informasi yang terbuka dan akurat.

Intelligentia - Dignitas